



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)

TA. 2021

DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN

Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 65 Lamongan 62216

Telp. (0322) 311106 Fax. (0322) 317529

Email : dinperpus@lamongankab.go.id

Website : www.lamongankab.go.id

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat, inayah, taufik dan hidayah Nya sehingga Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Lamongan dapat menyelesaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun Anggaran 2021 sebagai suatu bentuk laporan pertanggungjawaban kepada Kepala Daerah Kabupaten Lamongan.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun Anggaran 2021 ini merupakan media Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Lamongan dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta misinya selama Tahun Anggaran 2021.

Kami menyadari bahwa Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun Anggaran 2021 ini masih terdapat beberapa kekurangan, untuk itu kami mohon koreksi dan arahan dari semua pihak guna kesempurnaanya.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
2.1 Latar Belakang	1
1.1.1. Penjelasan Umum.....	1
A. Undang-Undang Pembentukan Daerah.....	1
B. Data Geografis Wilayah.....	2
C. Jumlah Penduduk.....	2
D. Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan.....	2
E. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional	3
F. Alokasi dan Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib	5
1.1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah.....	6
A. Permasalahan Strategis Pemerintahan Daerah	6
B. Visi dan Misi Kepala Daerah.....	6
C. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah	9
D. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan	11
1.1.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal	17
BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	18
2.1 Capaian Kinerja Makro.....	18
2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.....	18
2.2.1. Indikator Kinerja Kunci Keluaran	18
2.2.2. Indikator Kinerja Kunci Hasil	18
2.2.3. Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	18
2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	18
A. Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja	19

B. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja	19
C. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Tahun Sebelumnya	20
D. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Target dalam Pembangunan Jangka Menengah	22
E. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan dengan Hasil (Kinerja) yang Telah Dicapai	23
F. Analisis Program Dan Kegiatan Yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja	26
BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN	33
BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL	34
BAB V PENUTUP	35

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

1.1.1 PENJELASAN UMUM

A. Undang – Undang Pembentukan Daerah

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) menjelaskan Arah Kebijakan Umum Pemerintahan Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah secara makro termasuk Pendapatan dan Belanja Daerah, Penyelenggaraan Urusan Desentralisasi, penyelenggaraan Tugas Pembantuan, serta penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan, Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan sesuai kewenangan terdiri dari Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang pada dasarnya merupakan pelaksanaan hubungan kewenangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, atau antar Pemerintahan Daerah yang saling terkait dan sinergis sebagai satu sistem pemerintahan.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) juga menggambarkan pencapaian kinerja dalam Penyelenggaraan urusan-urusan yang secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, Urusan-urusan Pemerintahan yang dimaksud adalah urusan wajib dan urusan pilihan dan fungsi penunjang urusan Pemerintahan Daerah.

Adapun Dasar Hukum Pokok Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lamongan mengacu kepada peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019

Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;
6. Peraturan Bupati Nomor 66 tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Lamongan.

B. Data Geografis Wilayah

Kabupaten Lamongan merupakan salah satu kabupaten yang terdapat di provinsi Jawa Timur dengan ibukota Lamongan. Secara astronomis, Kabupaten Lamongan terletak pada 6°51'54"-7°23'06" lintang selatan dan 112°4'41"- 112°33'12" bujur timur. Berdasarkan letak geografisnya, Kabupaten Lamongan memiliki batas-batas wilayah yaitu sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Gresik, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Jombang, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban.

C. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Lamongan tahun 2021 sejumlah 1.380.145 jiwa.

D. Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan

Letak Administrasi Wilayah Kabupaten Lamongan terdiri dari 27 kecamatan meliputi 462 desa, 12 Kelurahan 1.431 dusun yang dibelah oleh Sungai Bengawan Solo dan secara garis besar daratannya dibedakan menjadi 3 karakteristik yaitu : Pertama, Bagian Tengah Selatan merupakan daerah daratan rendah yang relatif subur yang membentang dari kawasan daerah yang terdiri dari Kecamatan Kedungpring, Sukodadi, Pucuk, Lamongan, Deket, Tikung,

Sugio, Maduran, Sarirejo dan Kembangbahu. Kedua, Bagian Selatan dan Utara merupakan daerah daratan tinggi pegunungan kapur berbatu-batu dengan kesuburan sedang yang membentang dari kawasan daerah yang terdiri dari Kecamatan Mantup, Sambeng, Ngimbang, Bluluk, Sukorame, Modo, Brondong, Paciran, Solokuro. Ketiga, Bagian Tengah Utara merupakan daerah rawan banjir yang membentang dari kawasan daerah yang terdiri dari Kecamatan Babat, Sekaran, Laren, Turi, Glagah, Kalitengah, Karanggeneng, Karangbinangun. Kabupaten Lamongan memiliki luas wilayah kurang lebih 1.812,8 km² atau 3,78% dari luas wilayah Provinsi Jawa Timur. Dengan panjang garis pantai sepanjang 47 km apabila dihitung 12 mil dari permukaan laut, maka luas wilayah perairan laut Kabupaten Lamongan adalah seluas 90,4 km².

E. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural Dan Fungsional

a) Dilihat dari Tingkat Pendidikan

Tabel 1.1

Kualifikasi Pegawai berdasarkan Pendidikan

No	Uraian	Jenjang Pendidikan							
		SD	SMP	SLTA	D1	D2	D3	S1	S2
		-	-	2	-	-	2	14	7
	Jumlah	-	-	2	-	-	2	14	7

b) Dilihat dari Pangkat dan Golongan

Tabel 1.2

Kualifikasi Pegawai berdasarkan Golongan

No	Uraian	Golongan			
		I	II	III	IV
		-	2	18	5
	Jumlah	-	2	18	5

c) Dilihat dari jumlah pejabat struktural dan fungsional

Tabel 1.3

Kualifikasi Pegawai Berdasarkan jabatan Struktural

No	Uraian	Eselon						Fungsional	Staf
		IIA	IIB	IIIA	IIIB	IVA	IVB		
		-	-	1	4	11	-	3	6
	Jumlah	-	-	1	4	11	-	3	6

F. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja

No	Urusan	Anggaran Setelah Perubahan			Total	Realisasi			Total Belanja	Prosentase (%)	OPD Pilihan
		Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal		Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Perpustakaan	3.654.207.530	1.808.282.100	590.553.100	6.053.042.730	3.416.385.781	1.535.311.848	550.006.050	5.501.703.679	90,89	Dinas Perpustakaan Daerah

1.1.2 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

A. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah

Permasalahan Dan Solusi Dinas Perpustakaan Daerah

Permasalahan

1. Minat baca masyarakat terhadap perpustakaan yang menurun akibat adanya gadget
2. Koleksi bahan pustaka yang ada belum mencukupi kebutuhan pemustaka
3. Sarana dan prasarana bagi pemustaka disabilitas belum ada
4. Kurangnya SDM untuk ditempatkan di Perpustakaan yang ada dikecamatan
5. Infrastruktur berupa teknologi informasi dan komunikasi kurang mendukung layanan perpustakaan
6. Ruang baca perpustakaan kurang memadai mengingat bertambahnya koleksi dan pengunjung

Solusi

1. Perlu adanya kegiatan inovasi dari perpustakaan untuk menarik pengunjung agar datang ke perpustakaan
2. Perlu adanya penambahan anggaran untuk penyediaan bahan pustaka
3. Penyediaan sarana dan prasarana bagi penderita disabilitas
4. Penambahan SDM untuk Perpustakaan di kecamatan – kecamatan
5. Penambahan jaringan internet guna menunjang kebutuhan pengguna perpustakaan
6. Penambahan ruang baca agar pemustaka lebih nyaman berada di perpustakaan

B. Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi yang termuat dalam RPJMD merupakan visi Bupati/ Wakil Bupati terpilih pada pilkada yang dilaksanakan tanggal 09 Desember 2020. Sebagaimana disampaikan pada pemaparan visi dan misi calon Bupati/ Wakil Bupati di sidang DPRD dan sejalan dengan arah kebijakan

pembangunan daerah yang termuat dalam tahapan ketiga Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lamongan Tahun 2005 – 2025 dan RTRW Kabupaten Lamongan Tahun 2011 – 2031, Visi tersebut juga disinergikan dengan RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2021 – 2026 dan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 serta RPJM Nasional Tahun 2020-2024. Dari hasil integrasi dan harmonisasi beberapa kebijakan tersebut ditetapkan visi Kabupaten Lamongan Tahun 2021 – 2026 adalah :

" Terwujudnya Kejayaan Lamongan Yang Berkeadilan”.

Pemahaman atas pernyataan visi tersebut mengandung makna terwujudnya kejayaan di Kabupaten Lamongan dengan melibatkan seluruh kalangan masyarakat dalam merealisasikan dan semakin menuju kejayaan Kabupaten Lamongan secara berkeadilan untuk seluruh masyarakat di Kabupaten Lamongan.

Secara filosofis visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya yaitu :

- 1) Kejayaan Lamongan: adalah suatu kondisi terwujudnya Lamongan sebagai Kabupaten unggul dan maju, sejahtera lahir batin, terdepan dalam pembangunan infrastruktur, ekonomi dan sumber daya manusia di Jawa Timur.
- 2) Berkeadilan adalah suatu kondisi Lamongan yang semakin merata pelaksanaan pembangunan dan kondisi sosial ekonomi masyarakatnya serta semakin menurun kondisi ketimpangan antar wilayah. Berkeadilan juga bermakna keberpihakan untuk melindungi dan membina masyarakat yang secara ekonomi dan sosial yang secara kategori memerlukan perhatian lebih dengan kehadiran Pemerintah Daerah.

Untuk mewujudkan Visi Kabupaten Lamongan 2021 – 2026, “ Terwujudnya Kejayaan Lamongan Yang Berkeadilan” ditempuh melalui lima misi sebagai berikut :

- Misi 1
Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Daerah Melalui Optimalisasi Potensi Unggulan Daerah, dengan penjelasan sebagai berikut :

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara inklusif melalui optimalisasi potensi sektor unggulan dengan sasaran meningkatnya kualitas pelaku ekonomi dan meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan.

- Misi 2

Mewujudkan SDM unggul, berdaya saing dan berakhlak yang responsif terhadap perubahan zaman, dengan penjelasan sebagai berikut :

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pembangunan manusia yang berdaya saing dengan sasaran meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pelayanan dasar pendidikan, meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat, meningkatnya kualitas pembangunan kepemudaan dan meningkatnya daya beli masyarakat.

- Misi 3

Mewujudkan insfratuktur handal dan berkeadilan yang berwawasan lingkungan, dengan penjelasan sebagai berikut :

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap insfratuktur daerah yang ramah lingkungan dengan sasaran meningkatnya pembangunan insfratuktur yang berkualitas dan merata, meningkatnya kualitas hidup daerah dan meningkatnya kapasitas kesiapsiagaan bencana.

- Misi 4

Mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang sejahtera, religius-berbudaya, aktif dalam pembangunan, serta lingkungan yang aman dan tentram, dengan penjelasan sebagai berikut:

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan harmonisasi sosial masyarakat yang memperhatikan kearifan lokal dengan sasaran meningkatnya pelayanan terhadap masyarakat pemerlu kesejahteraan sosial, meningkatnya toleransi, meningkatnya rasa aman masyarakat, meningkatnya solidaritas masyarakat dalam bergotong royong dan meningkatnya masyarakat berbudaya.

- Misi 5

Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang dinamis serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas sebagai upaya optimalisasi reformasi birokrasi, dengan penjelasan sebagai berikut :

Misi ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan reformasi birokrasi melalui peningkatan kepuasan masyarakat terhadap layanan dan kapasitas manajemen pemerintahan hingga ke desa dengan sasaran meningkatnya layanan publik yang inovatif, meningkatnya kapasitas (ASN) Pemerintah Daerah, meningkatnya manajemen pemerintahan yang handal dan meningkatnya kemandirian desa.

Adapun misi yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan Kab. Lamongan adalah Misi ke-2 (Dua) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026 yaitu **“Mewujudkan SDM Unggul, Berdaya Saing dan Berakhlak yang Responsif Terhadap Perubahan Zaman”**.

Dalam rangka mendukung pencapaian misi ke-2 ditetapkan tujuan: **“Meningkatkan kualitas pembangunan manusia yang berdaya saing”** . Sasaran strategis yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi Dinas Perpustakaan Daerah adalah **“Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pelayanan dasar pendidikan”**.

C. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah

Sesuai dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD yaitu Terwujudnya Budaya Baca, dalam rangka mendukung upaya mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan, perlu ditetapkan beberapa tujuan dan sasaran strategis dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang dengan asumsi bahwa Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Lamongan tetap konsisten dengan misi yang dikembangkan dalam periode tersebut. Adapun Tujuan dan Sasaran Dinas Perpustakaan Daerah Tahun 2016 – 2021 mengacu pada tujuan dan sasaran dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE –					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
SEBELUM REVISI (2016 – 2017)									
1	Meningkatnya fungsi perpustakaan sebagai sarana pendukung budaya literasi guna meningkatkan kecerdasan masyarakat	Meningkatnya minat baca masyarakat dan sumber daya perpustakaan	Prosentase pengunjung perpustakaan di Kab. Lamongan	83,86%	100,61%	117,33%	134,07%	150,80%	167,54%
			Prosentase koleksi bahan pustaka di Kab. Lamongan	65%	72%	77%	80%	83%	84%
SETELAH REVISI (2018 – 2021)									
	Meningkatnya minat baca masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan perpustakaan	IKM layanan perpustakaan	79,23	79,74	80,25	80,72	81,22	81,26
			Prosentase pertumbuhan kunjungan perpustakaan	5 %	5 %	5 %	5 %	5 %	5 %

D. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan

Dinas Perpustakaan Daerah sebagai lembaga perpustakaan yang bertugas mencerdaskan kehidupan bangsa dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah memiliki Program dan usulan tahun 2021 yang merupakan suatu hasil kajian terhadap program dan kegiatan dari tingkat provinsi. Disamping itu Dinas Perpustakaan Daerah juga merangkum referensi kebutuhan informasi dari masyarakat, perguruan tinggi maupun Perangkat Daerah di Kabupaten Lamongan.

Tahun 2021 diharapkan Kabupaten Lamongan menjadi Kabupaten Literasi yang artinya Kabupaten yang bebas dari buta huruf, untuk itu selain program Wajib Belajar 9 Tahun yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan wajib di ikuti oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota, Lamongan juga menggalakkan program 18-21 yang didukung oleh Dinas Pendidikan, program Lamongan Gemar Membaca yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Lamongan dengan cara jemput bola yaitu mendatangi daerah – daerah yang sulit mendapatkan akses informasi. Perpustakaan keliling adalah andalan dari Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Lamongan;

Perpustakaan keliling dan penempatan sudut baca pada fasum yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Lamongan juga menjadi salah satu kegiatan yang saat ini sedang diminati oleh masyarakat di Kabupaten Lamongan karena manfaatnya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat.

Dalam mencapai tujuan dan sasaran maka diperlukan suatu strategi dengan menetapkan beberapa program yang sesuai dengan review RPJMD Tahun 2016 - 2021. Adapun program – program tersebut menurut Urusannya adalah sebagai berikut :

Urusan Perpustakaan

- i. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- ii. Program Pembinaan Perpustakaan
- iii. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno

Adapun beberapa kegiatan dan sub kegiatan untuk menunjang suksesnya sasaran dan program yang telah dibuat oleh Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut :

- 1) **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan :**
 - a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan sub kegiatan :
 - i. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dipergunakan untuk menyusun dokumen perencanaan dengan indikator yang meliputi dokumen Renstra, Renja, RKPD.
 - ii. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dipergunakan untuk survey kegemaran membaca dengan indikator dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar dan dokumen SKM.
 - iii. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dipergunakan untuk menyusun laporan evaluasi kinerja dengan indikator dokumen LPPD, LKPJ dan LKJiP.
 - b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan sub kegiatan :
 - i. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dipergunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan PNS dengan indikator pembayaran gaji dan tunjangan ASN yang tepat waktu.
 - ii. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dipergunakan untuk menyusun laporan keuangan akhir tahun dengan indikator 3 laporan akhir tahun yang tersedia.
 - iii. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dipergunakan untuk menyusun laporan keuangan bulanan/ semesteran dengan indikator jumlah laporan keuangan yang tersedia sebanyak 12 laporan
 - c) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan sub kegiatan :
 - i. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya dipergunakan untuk pengadaan pakaian dinas. Sebanyak 63 set.

- d) Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan sub kegiatan :
- i. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dipergunakan untuk pembelian komponen instalasi listrik dan bangunan kantor dengan indikator jumlah komponen instalasi listrik dan bangunan kantor sebanyak 13 jenis.
 - ii. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dipergunakan untuk pembelian peralatan dan perlengkapan kantor dengan indikator jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan sebanyak 10 jenis.
 - iii. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dipergunakan untuk pembelian peralatan dan perlengkapan kebersihan kantor dengan indikator jumlah peralatan dan perlengkapan kebersihan kantor sebanyak 26 jenis
 - iv. Penyediaan Bahan Logistik Kantor dipergunakan untuk pembelian ATK, makanan dan minuman rapat/tamu dengan indikator jumlah ATK sebanyak 46 jenis dan jumlah makanan dan minuman rapat dan tamu yang disediakan sebanyak 390 box.
 - v. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dipergunakan untuk pengadaan barang cetak dan penggandaan dengan indikator jumlah barang cetak dan penggandaan sebanyak 3 jenis.
 - vi. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dipergunakan untuk pengadaan bahan bacaan (majalah & surat kabar) dan peraturan-undangan dengan indikator sebanyak 10 judul .
 - vii. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dipergunakan untuk perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah dengan indikator sebanyak 39 kali.
- e) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan sub kegiatan :
- i. Penyediaan Jasa Surat Menyurat dipergunakan untuk pengiriman surat dengan indikator jumlah surat yang terkirim sebanyak 400 surat.
 - ii. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dipergunakan untuk pembayaran rekening air, listrik, telepon dengan indikator jumlah rekening terbayar sebanyak 5 rekening.

- iii. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dipergunakan untuk pembayaran jasa tenaga administrasi, jasa tenaga kebersihan dan pengamanan kantor dengan indikator sebanyak 37 orang.
- f) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan sub kegiatan :
- i. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dipergunakan untuk perawatan dan operasional mobil jabatan dengan indikator jumlah mobil jabatan sebanyak 2 mobil.
 - ii. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dipergunakan untuk perawatan, penyuratan mobil operasional atau sepeda motor operasional dengan indikator sebanyak 6 mobil dan 9 sepeda motor.
 - iii. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dipergunakan untuk pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor dengan indikator sebanyak 4 peralatan.
 - iv. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dipergunakan untuk pemeliharaan atau rehabilitasi gedung kantor dengan indikator jumlah gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan/direhap sebanyak 1 bangunan

2) **Program Pembinaan Perpustakaan, dengan kegiatan :**

- a) Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan :
 - i. Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik digunakan untuk pembayaran jaringan internet layanan perpustakaan dengan indikator jumlah jaringan internet yang terbayar sebanyak 1 jaringan.
 - ii. Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota digunakan untuk mengembangkan perpustakaan umum dengan indikator jumlah perpustakaan yang dikembangkan sebanyak 1 lembaga perpustakaan.

- iii. Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota digunakan untuk mengembangkan kekhasan koleksi perpustakaan dengan indikator jumlah katalog induk daerah (KID) yang dicetak sebanyak 80 eksemplar, jumlah koleksi bibliografi yang dicetak sebanyak 80 eksemplar, jumlah koleksi kekhasan daerah (deposit yang didayagunakan) sebanyak 50 eksemplar.
- iv. Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan digunakan untuk pembinaan perpustakaan sekolah dengan indikator jumlah pembinaan pada lembaga pendidikan sebanyak 80 lembaga pendidikan.
- v. Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota digunakan untuk peningkatan kapasitas tenaga pengelola perpustakaan dengan indikator jumlah tenaga pengelola perpustakaan sekolah dan desa yang dibimtek sebanyak 25 orang.
- vi. Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota digunakan untuk peningkatan layanan perpustakaan umum sabtu-minggu dan minggu ceria dengan indikator jumlah layanan perpustakaan sabtu-minggu dan minggu ceria dengan total target 450 jam.
- vii. Pengembangan Bahan Pustaka digunakan untuk pengadaan dan penambahan koleksi bahan pustaka dengan indikator jumlah bahan pustaka yang diadakan sebanyak 330 eksemplar.
- viii. Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka digunakan untuk pengolahan bahan pustaka yang sudah diadakan dengan indikator jumlah bahan pustaka yang diolah sebanyak 300 eksemplar.
- ix. Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi dana sebesar digunakan untuk penyusunan data tentang perpustakaan dengan indikator jumlah perpustakaan yang mempunyai nomor pokok perpustakaan sebanyak 20 lembaga.

- b) Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan :
 - i. Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat digunakan untuk meningkatkan budaya baca dan layanan perpustakaan keliling dengan indikator jumlah kegiatan lomba yang dilaksanakan sebanyak 1 kegiatan dan jumlah layanan perpustakaan keliling di 30 lokasi.
 - ii. Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota digunakan untuk pemeliharaan dan pembangunan sarana perpustakaan dengan indikator jumlah monev sudut baca sebanyak 2 sudut baca dan jumlah sudut baca yang dibentuk sebanyak 1 sudut baca..

3) **Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno, dengan kegiatan :**

- a) Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan :
 - i. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno digunakan untuk pendataan naskah kuno dengan indikator jumlah naskah kuno yang didata sebanyak 1 data.
 - ii. Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan digunakan untuk pengalihmediakan naskah kuno yang dimiliki dengan indikator jumlah naskah kuno/muatan lokal yang dialihmediakan sebanyak 5 CD.
- b) Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan :
 - i. Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara digunakan untuk mengembangkan koleksi budaya etnis dengan indikator jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang dicetak sebanyak 20 eksemplar.

1.1.3 PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Lamongan tidak melaksanakan penerapan standar pelayanan minimal.

BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

2.1 Capaian Kinerja Makro

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional.

2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah. Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah memuat data/informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang. Data/informasi setiap indikator wajib diisi oleh pemerintah daerah secara lengkap.

2.2.1 INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN/OUTPUT

Tabel Terlampir

2.2.2 INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL/OUTCOME

Tabel Terlampir

2.2.3 INDIKATOR KINERJA KUNCI UNTUK FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Lamongan tidak melaksanakan tugas fungsi urusan pemerintahan

2.3 AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH

Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Lamongan secara umum telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pelaksana pembangunan bidang perpustakaan di Kabupaten Lamongan baik kegiatan yang bersifat administrasi ketatausahaan maupun bersifat teknis. Seluruh program kegiatan telah berjalan dengan baik, dalam hal memberikan pelayanan bahan pustaka bagi masyarakat

Kabupaten Lamongan. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan pengunjung yang meningkat dari tahun ke tahun merupakan indikator keberhasilan pembangunan di bidang perpustakaan.

A. Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja

Target kinerja Dinas Perpustakaan Daerah dalam perjanjian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.1 Tabel Target Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya kualitas pelayanan perpustakaan	Prosentase pertumbuhan kunjungan perpustakaan	%	5 %
		IKM Layanan Perpustakaan	Indeks	81,22

B. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja

Tabel 2.2 Capaian Kinerja Kegiatan Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan perpustakaan	Prosentase pertumbuhan kunjungan perpustakaan	%	5 %	5,27 %	105,40 %
		IKM Layanan Perpustakaan	Indeks	81,22	82,27	101,24 %

Dari Tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja pemerintah Kabupaten Lamongan urusan perpustakaan adalah sebagai berikut :

- a. Prosentase pertumbuhan kunjungan perpustakaan pada tahun 2021 mencapai 5,27%, mengalami kenaikan 0,27% dari target yang telah ditetapkan yaitu 5%. Meskipun Indonesia khususnya Lamongan mengalami pademi Covid-19. Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan mengambil beberapa kebijakan dalam rangka peningkatan

kewaspadaan terhadap pencegahan penyebaran virus covid-19 dengan memberikan pembatasan kegiatan pelayanan publik yang menghadirkan banyak orang secara tatap muka akan tetapi Perpustakaan sebagai salah satu pelayanan publik penyedia informasi tetap harus menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara optimal meski berada di tengah pandemi Dinas Perpustakaan Daerah melaksanakan berbagai kegiatan inovasi untuk meningkatkan jumlah kunjungan seperti Cerita Online Lamongan (Celengan), Digital Library (iLamongan), Ruang Bincang Asyik Cerita Anak Bangsa (Ruang Baca) .

- b. Capaian nilai konversi IKM di perpustakaan mencapai 82,27 di atas target yang ditetapkan 81,26. Hal ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan perpustakaan umum sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan akan terus ditingkatkan lagi dalam hal pelayanan sehingga akan meningkatkan kualitas layanan perpustakaan umum.

C. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 2.3 Perbandingan Realisasi Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja			Realisasi		
			2019	2020	2021	2019	2020	2021
1	Meningkatnya kualitas layanan perpustakaan	Prosentase pertumbuhan kunjungan perpustakaan	5 %	5 %	5 %	5,18 %	3,48 %	5,27 %
		IKM Layanan Perpustakaan	80,72	81,22	81,26	80,96	80,06	82,27

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Lamongan dengan Sasaran Startegis Meningkatkan kualitas layanan perpustakaan dengan dua indikator yaitu prosentase pertumbuhan kunjungan perpustakaan dan Nilai IKM layanan perpustakaan tiap tahun realisasinya melampaui target yang telah ditetapkan namun pada tahun 2020 mengalami penurunan dari target yang telah ditetapkan. Untuk tahun 2021 realisasinya melampaui target yang telah ditetapkan meskipun masih dalam keadaan pandemi Covid 19 karena Dinas Perpustakaan Daerah sebagai salah

satu pelayanan publik penyedia informasi tetap harus menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara optimal dan terus selalu meningkatkan kualitas layanan sehingga dapat meningkatkan kepuasan masyarakat. Selain itu untuk dapat memenuhi kebutuhan informasi masyarakat Dinas Perpustakaan Daerah melaksanakan berbagai kegiatan inovasi untuk meningkatkan jumlah kunjungan seperti Cerita Online Lamongan (Celengan), Digital Library (iLamongan), Ruang Bincang Asyik Cerita Anak Bangsa (Ruang Baca).

D. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Dalam Pembangunan Jangka Menengah

Tabel 2.4 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode RPJMD/ RENSTRA

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE -						REALISASI KINERJA PADA TAHUN KE -					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
SEBELUM REVISI (2016 – 2017)															
1	Meningkatnya fungsi perpustakaan sebagai sarana pendukung budaya literasi guna meningkatkan kecerdasan masyarakat	Meningkatnya minat baca masyarakat dan sumber daya perpustakaan	Prosentase pengunjung perpustakaan di Kab. Lamongan Prosentase koleksi bahan pustaka di Kab. Lamongan	83,86% 65%	100,61 % 72%	- -	- -	- -	- -	83,86% 65%	102,49 % 76%	- -	- -	- -	- -
SETELAH REVISI (2018 – 2021)															
	Terwujudnya Budaya Baca	Meningkatnya kualitas pelayanan perpustakaan	IKM Pelayanan Perpustakaan Prosentase perpumbuhan kunjungan perpustakaan	- -	- -	80,25 -	80,72 5%	81,22 5%	81,26 5%	- -	- -	80,25 5,14%	80,96 5,14%	80,06 3,48%	82,27 5,27 %

E. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan Dengan Hasil (Kinerja) yang Telah Dicapai

Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Lamongan pada tahun 2021 mendapat dana APBD dan DAK sebesar Rp 6.053.042.730 dan terealisasi sebesar Rp. 5.473.783.679 atau 90,43%. Dengan rincian sebagai berikut :

PD	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH	6.053.042.730,00	5.473.783.679,00	90,43%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.264.542.731,00	4.815.443.429,00	91,47%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	53.000.000,00	46.362.800,00	87,48%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.000.000,00	6.522.300,00	65,22%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	33.000.000,00	31.847.000,00	96,51%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000.000,00	7.993.500,00	79,94%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.674.107.531,00	3.441.303.361,00	93,66%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.649.107.531,00	3.416.385.781,00	93,62%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	15.000.000,00	14.988.890,00	99,93%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	10.000.000,00	9.928.690,00	99,29%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	29.920.000,00	28.864.000,00	96,47%
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	29.920.000,00	28.864.000,00	96,47%
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0,00	0,00	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	179.500.000,00	165.176.700,00	92,02%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.000.000,00	14.999.800,00	100%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.000.000,00	19.994.600,00	99,97%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	30.100.000,00	29.899.300,00	99,33%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	49.400.000,00	45.601.100,00	92,31%

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.000.000,00	20.000.000,00	100%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15.000.000,00	14.595.000,00	97,30%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30.000.000,00	20.086.900,00	66,96%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00%
Pengadaan Mebel	0,00	0,00	0,00%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	0,00%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.014.015.200,00	840.276.068,00	82,87%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000,00	2.990.500,00	99,68%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	181.499.200,00	89.703.958,00	49,42%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	829.516.000,00	747.581.610,00	90,12%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	314.000.000,00	293.460.500,00	93,46%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	95.000.000,00	89.455.500,00	94,16%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	78.000.000,00	65.610.000,00	84,12%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.000.000,00	25.000.000,00	100%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	116.000.000,00	113.395.000,00	97,75%
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	762.000.000,00	652.460.250,00	85,62%
Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	703.000.000,00	621.686.000,00	88,43%
Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	43.000.000,00	40.570.200,00	94,35%
Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	500.000.000,00	459.858.550,00	91,97%
Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000,00	9.266.500,00	92,67%
Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	10.000.000,00	8.079.950,00	80,80%

Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	5.000.000,00	2.767.700,00	55,35%
Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	15.000.000,00	1.120.000,00	7,47%
Pengembangan Bahan Pustaka	95.000.000,00	92.109.300,00	96,96%
Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	10.000.000,00	5.714.000,00	57,14%
Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	15.000.000,00	10.079.800,00	67,20%
Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	59.000.000,00	41.174.250,00	69,79%
Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	32.000.000,00	17.119.950,00	53,50%
Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	27.000.000,00	24.053.300,00	89,09%
PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	26.500.000,00	15.520.000,00	58,57%
Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	16.500.000,00	11.880.000,00	72,00%
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	8.000.000,00	6.640.000,00	83,00%
Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	8.500.000,00	5.240.000,00	61,65%
Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000,00	3.640.000,00	36,40%
Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	10.000.000,00	3.640.000,00	36,40%
Jumlah	6.053.042.730,00	5.501.703.679,00	90,89%

F. Analisis Program dan Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja.

Pelaksanaan kegiatan pembangunan urusan perpustakaan yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Lamongan melalui 3 (tiga) program, 10 (sepuluh) kegiatan dan 36 (tiga puluh enam) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 6.053.042.730 dan terealisasi sebesar Rp. 5.501.703.679 atau 90,89%. Adapun rincian penggunaan anggaran sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan :
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan alokasi dana Rp. 53.000.000 dibagi menjadi sub kegiatan :
 - i. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan alokasi dana sebesar Rp. 10.000.000 dipergunakan untuk menyusun dokumen perencanaan yang meliputi dokumen Renstra, Renja, RKPD dan lain-lain. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp 6.522.300 atau 65,22%.
 - ii. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan alokasi dana sebesar Rp. 33.000.000 dipergunakan untuk survey kegemaran membaca dan menyusun dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar dan lain-lain. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp 31.847.000 atau 98,90%.
 - iii. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan alokasi dana sebesar Rp. 10.000.000 dipergunakan untuk menyusun laporan evaluasi dan lain-lain. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp 7.993.500 atau 79,94%.
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan alokasi dana sebesar Rp 3.964.124.000 dibagi menjadi sub kegiatan :
 - i. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan alokasi dana sebesar Rp. 3.649.107.530 dipergunakan untuk pembayaran gaji dan

- tunjangan PNS dan lain-lain. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp 3.416.385.781 atau 93,62%.
- ii. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan alokasi dana sebesar Rp. 15.000.000 dipergunakan untuk menyusun laporan keuangan akhir tahun dan lain-lain. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp 14.988.890 atau 99,93%.
 - iii. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dengan alokasi dana sebesar Rp. 10.000.000 dipergunakan untuk menyusun laporan keuangan bulanan/ semesteran dan lain-lain. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp 9.928.690 atau 99,29%.
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan alokasi dana sebesar Rp. 29.920.000 dibagi menjadi sub kegiatan :
- i. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya dengan alokasi dana sebesar Rp. 29.920.000 dipergunakan untuk pengadaan pakaian dinas. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp 28.864.000 atau 96,47%.
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan alokasi dana sebesar Rp. 179.500.000 dibagi menjadi sub kegiatan :
- i. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan alokasi dana sebesar Rp. 15.000.000 dipergunakan untuk pembelian komponen instalasi listrik dan bangunan kantor dan lain-lain. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp 14.999.800 atau 100%.
 - ii. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan alokasi dana sebesar Rp. 20.000.000 dipergunakan untuk pembelian peralatan dan perlengkapan kantor dan lain-lain. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp 19.994.600 atau 99,97%.
 - iii. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan alokasi dana sebesar Rp. 30.100.000 dipergunakan untuk pembelian peralatan

- dan perlengkapan kebersihan kantor dan lain-lain. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp 29.899.300 atau 99,33%.
- iv. Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan alokasi dana sebesar Rp. 49.400.000 dipergunakan untuk pembelian ATK, makanan dan minuman rapat/tamu dan lain-lain. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp 45.601.100 atau 92,31%.
 - v. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan alokasi dana sebesar Rp. 20.000.000 dipergunakan untuk pengadaan barang cetak dan penggandaan dan lain-lain. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp 20.000.000 atau 100%.
 - vi. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan alokasi dana sebesar Rp. 15.000.000 dipergunakan untuk pengadaan bahan bacaan (majalah & surat kabar) dan perundang-undangan dan lain-lain. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp 14.595.000 atau 97,30%.
 - vii. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan alokasi dana sebesar Rp. 30.000.000 dipergunakan untuk perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp 20.086.900 atau 66,96%.
- e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan alokasi dana sebesar Rp. 1.014.015.200 dibagi menjadi sub kegiatan :
- i. Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan alokasi dana sebesar Rp. 3.000.000 dipergunakan untuk pengiriman surat dan lain-lain. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp 2.990.500 atau 99,68%.
 - ii. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan alokasi dana sebesar Rp. 181.499.200 dipergunakan untuk pembayaran rekening air, listrik, telepon dan lain-lain. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp 89.703.958 atau 49,42%.
 - iii. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan alokasi dana sebesar Rp. 829.516.000 dipergunakan untuk pembayaran jasa tenaga administrasi, jasa tenaga kebersihan dan pengamanan

kantor dan lain-lain. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp 747.581.610 atau 90,12%.

- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan alokasi dana sebesar Rp. 314.000.000 dibagi menjadi sub kegiatan :
 - i. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan alokasi dana sebesar Rp. 95.000.000 dipergunakan untuk perawatan dan operasional mobil jabatan dan lain-lain. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp 89.455.500 atau 94,16%.
 - ii. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan alokasi dana sebesar Rp. 78.000.000 dipergunakan untuk perawatan, penyuratan mobil operasional atau sepeda motor operasional dan lain-lain. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp 65.610.000 atau 84,12%.
 - iii. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan alokasi dana sebesar Rp. 25.000.000 dipergunakan untuk pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor dan lain-lain. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp 25.000.000 atau 100%.
 - iv. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan alokasi dana sebesar Rp. 116.000.000 dipergunakan untuk pemeliharaan atau rehabilitasi gedung kantor. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp 113.395.000 atau 97,75%.

2. Program Pembinaan Perpustakaan, dengan kegiatan :

- a. Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi dana sebesar Rp 703.000.000 dibagi menjadi sub kegiatan :
 - i. Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik dengan alokasi dana sebesar Rp. 43.000.000 dipergunakan untuk pembayaran jaringan internet otomatisasi dan

- pemeliharaan aplikasi inlislite. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp 40.570.200 atau 94,35%.
- ii. Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi dana sebesar Rp. 500.000.000 dipergunakan untuk pengadaan meubelair di ruang baca yang berasal dari dana DAK. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp 459.858.550 atau 91,97%.
 - iii. Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi dana sebesar Rp. 10.000.000 dipergunakan untuk koleksi bibliografi, koleksi kekhasan daerah, deposit yang didayagunakan dan mencetak KID dan lain-lain. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp 9.266.500 atau 92,67%.
 - iv. Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan dengan alokasi dana sebesar Rp. 10.000.000 dipergunakan untuk melaksanakan pembinaan pada lembaga pendidikan dan lain-lain. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp 8.079.950 atau 80,80%.
 - v. Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi dana sebesar Rp. 5.000.000 dipergunakan untuk bimtek tenaga pengelola perpustakaan sekolah dan desa yang terakreditasi dan lain-lain. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp 2.767.700 atau 55,35%.
 - vi. Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota dengan alokasi dana sebesar Rp. 15.000.000 dipergunakan untuk layanan perpustakaan sabtu-minggu dan minggu ceria di alun-alun dan lain-lain. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp 1.120.000 atau 7,47%.
 - vii. Pengembangan Bahan Pustaka dengan alokasi dana sebesar Rp. 95.000.000 dipergunakan untuk pengadaan bahan pustaka di perpustakaan umum dan lain-lain. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp 92.109.300 atau 96,96%.

- viii. Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka dengan alokasi dana sebesar Rp. 10.000.000 dipergunakan untuk pengelolaan buku/bahan bacaan dan lain-lain. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp 5.714.000 atau 57,14%.
 - ix. Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi dana sebesar Rp. 15.000.000 dipergunakan untuk mencari data perpustakaan dan pengelola perpustakaan dan lain-lain. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp 10.079.800 atau 67,20%.
- b. Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi dana sebesar Rp 59.000.000 dibagi menjadi sub kegiatan :
- i. Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat dengan alokasi dana sebesar Rp. 32.000.000 dipergunakan untuk layanan perpustakaan keliling dan lomba bertutur/mendongeng tingkat Kabupaten dan lain-lain. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp 17.119.950 atau 53,50%.
 - ii. Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi dana sebesar Rp. 27.000.000 dipergunakan untuk pembentukan sudut baca atau movev sudut baca dan lain-lain. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp 24.054.300 atau 89,09%.
3. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno, dengan kegiatan :
- a. Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi dana sebesar Rp 16.500.000 dibagi menjadi sub kegiatan :
 - i. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno dengan alokasi dana sebesar Rp. 8.000.000 dipergunakan untuk pendataan

naskah kuno dan lain-lain. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp 6.640.000 atau 83,00%.

ii. Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan dengan alokasi dana sebesar Rp. 8.500.000 dipergunakan untuk alihmediakan naskah kuno/muatan lokal dan lain-lain. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp 5.240.000 atau 61,65%.

b. Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah, dengan alokasi dana sebesar Rp 10.000.000 dibagi menjadi sub kegiatan :

i. Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara dengan alokasi dana sebesar Rp. 10.000.000 dipergunakan untuk pemeliharaan koleksi budaya etnis nusantara yang dicetak dan lain-lain. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp 3.640.000 atau 36,40%.

BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Lamongan tidak melaksanakan tugas pembantuan.

BAB IV

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Lamongan tidak menerapkan standar pelayanan minimal.

BAB V

PENUTUP

Demikian beberapa hal yang dapat diinformasikan dalam laporan kinerja ini sebagai bahan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Perangkat Daerah (LPPD) Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2021 kepada Bupati Lamongan, semoga bisa bermanfaat dan dapat meningkatkan pembagunan khususnya pada bidang perpustakaan sebagai urusan wajib bukan pelayanan dasar daerah.

Lamongan, Januari 2022

KEPALA DINAS
KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN



FARAH DAMAYANTI ZUBAIDAH, S.Sos., M.Si

Pembina Tingkat I
NIP. 19730509 199803 2 005

LAMPIRAN

Indikator Kinerja Kunci Keluaran																			
(1)	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja								Sumber Data	Keterangan							
(1)	(2)	(3)	(4)								(5)	(6)							
1	Urusan Perpustakaan	1. Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat yang diukur menggunakan survei/kajian kegemaran membaca masyarakat = 63,4 nilai								Kajian Kegemaran Membaca Masyarakat Indonesia tahun 2021	Kabupaten Lamongan menjadi sampling dalam Kajian Kegemaran Membaca Masyarakat tahun 2021 oleh Perpunas							
		2. Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang didapatkan dengan metode sensus dengan mengukur sejumlah unsur pembangunan literasi masyarakat (UPLM) dan aspek masyarakat (AM)	UPLM 1	=	Pemerataan layanan	=	$\frac{19}{1.717}$	=	1,11%								Dinas Perpustakaan Daerah Kab. Lamongan	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) di Kabupaten Lamongan dengan metode survey tersebut belum dilakukan karena masih kegiatan baru.
				UPLM 2	=	Ketercukupan koleksi	=	$\frac{4.232.899}{1.380.145}$	=	306,70%									
				UPLM 3	=	Ketercukupan tenaga perpustakaan	=	$\frac{4.432}{1.968}$	=	225,20%									
				UPLM 4	=	Tingkat kunjungan masyarakat ke perpustakaan	=	$\frac{844.602}{1.380.145}$	=	61,20%									
				UPLM 5	=	Perpustakaan ber-SNP	=	$\frac{44}{1.968}$	=	2,24%									
				UPLM 6	=	Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan perpustakaan	=	$\frac{115}{1.380.145}$	=	0,01%									
				UPLM 7	=	Anggota perpustakaan	=	$\frac{18.707}{1.380.145}$	=	1,36%									
																			597,81% : 7 = 85,40%

Indikator Kinerja Kunci Hasil								
No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja				Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)
1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	1. Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	Koleksi perpustakaan yang tersedia di berbagai perpustakaan di wilayahnya (dalam eksemplar)	$\times 100\% = \frac{7.979.743}{1.380.145}$	$\times 100\% = 5,78$		Dinas Perpustakaan Daerah dan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Lamongan	-
			Jumlah penduduk di wilayahnya (dalam jiwa)					
		2. Presentase kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	Jumlah kunjungan pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan baik secara online maupun on site	$\times 100\% = \frac{844.602}{1.380.145}$	$\times 100\% = 61\%$		Dinas Perpustakaan Daerah dan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Lamongan	-
			Jumlah penduduk di wilayahnya (dalam jiwa)					
		3. Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	Ketersediaan tenaga perpustakaan di berbagai perpustakaan di wilayahnya	$\times 100\% = \frac{4.432}{1.380.145}$	$\times 100\% = 0,003$		Dinas Perpustakaan Daerah dan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Lamongan	-
	Jumlah penduduk di wilayahnya (dalam jiwa)							
	4. Presentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	Jumlah perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	$\times 100\% = \frac{44}{1.968}$	$\times 100\% = 2,24\%$		Dinas Perpustakaan Daerah Kab. Lamongan	-	
		Jumlah perpustakaan dari berbagai jenis yang terdapat di wilayahnya						
	5. Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat	Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat		= 19 Kegiatan		Dinas Perpustakaan Daerah Kab. Lamongan	-	
Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat		1. Jumlah naskah kuno yang diakuisisi atau dialih media (digitalisasi) atau terdaftar yang ada di wilayahnya	Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/terdaftar yang ada di wilayahnya		= 2 Naskah Kuno	Dinas Perpustakaan Daerah Kab. Lamongan	1. Serat Yusuf, Lokasi : Museum Sunan Drajat Paciran 2. Kitab Amhjah, Lokasi : Museum Sunan Drajat Paciran	
		2. Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa	Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa sebanyak (Yang dimaksud naskah kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang berumur paling rendah 50 tahun dan mempunyai nilai penting bagi kebudayaan nasional, sejarah dan ilmu pengetahuan)		= 2 Naskah Kuno	Dinas Perpustakaan Daerah Kab. Lamongan	Tahun 2021 ada 2 naskah kuno yang ditemukan yaitu Serat Yusuf dan Kitab Amhjah dan kedua naskah kuno tersebut sudah dialih aksara dan dialih bahasa, hasil dari alih aksara dan alih bahasa sekarang tersimpan di Perpustakaan Umum Kabupaten Lamongan	
		3. Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item) sebanyak Yang dimaksud dengan Koleksi Budaya Etnis Nusantara adalah semua bahan perpustakaan yang membahas tentang etnis baik yang mutakhir maupun retrospektif yang memuat informasi tentang 7 (tujuh) unsur kebudayaan sesuai dengan peraturan perundangan		= 1 Judul	Dinas Perpustakaan Daerah Kab. Lamongan	Judul : City Branding Lamongan Megilan, oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan	